

Aspek hukum penerapan prinsip pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas

Mochamad Arief S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111749&lokasi=lokal>

Abstrak

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang bertumpu dan berintikan pada kegiatan usaha eksplorasi dan kegiatan eksploitasi, dimana baik pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi adalah merupakan kegiatan yang penuh risiko dan dinamis, serta merupakan suatu kegiatan usaha yang menggunakan teknologi tinggi (high technology), padat modal (high capital) dan berisiko tinggi (high risk), sehingga keperluan untuk pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi baik pada kegiatan inti yang meliputi kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi maupun kegiatan usaha penunjang sangat besar.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, prinsip pengutamaan barang jasa dalam negeri pada prinsipnya telah dilaksanakan dan didukung oleh peraturan perundang-undangan sejak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sampai ke peraturan pelaksanaannya termasuk sudah diterbitkannya Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTKNI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama pada Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini ternyata apa yang diharapkan di atas masih jauh dari harapan dan tujuan yang diinginkan. Dari hasil kegiatan usaha minyak dan gas bumi selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal pada peningkatan kapasitas dan pengembangan sektor riil khususnya dalam mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional sebagaimana tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Industri Minyak dan Gas Bumi saat ini masih tergantung pada permodalan dengan seluruh project finance dibiayai oleh lembaga keuangan asing, sumber daya manusia dan teknologi asing.

Hambatan dan permasalahan dalam mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi selama ini antara lain :

1. Lemahnya dukungan industri perbankan nasional dalam mendukung industri minyak dan gas bumi nasional khususnya industri/jasa nasional minyak dan gas bumi.
2. Adanya keberagaman penafsiran terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTKNI/2004 tersebut sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Masih adanya permasalahan dengan peraturan perundang-undangan sektor lain yang terkait.

Untuk menumbuhkembangkan kemampuan nasional khususnya barang/jasa dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diperlukan :

1. dukungan industri perbankan nasional terhadap industri minyak dan gas bumi nasional khususnya industri/jasa nasional minyak dan gas bumi agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan

internasional.

2. penataan kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa secara nasional;
3. perlunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengingat fungsi Pemerintah c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.